

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur/Jurnal

- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Enggarsasi, Umi Dan Atet Sumanto, 2015, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Perspektif Vol. XX No. 2, Edisi Mei 2015
- Hutahaean, Bilher, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 Tahun 2013
- Moeleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ke 2, Bandung: Alumni
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet. Pertama, Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjowinoto, Petrus., 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soaegijapranata

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan

### **C. Internet**

Internet, 26 oktober 2017 pukul : 17:02 WIB.

<https://nasional.sindonews.com/read/1029405/13/lapas-anak-berubah-jadi-lembaga-pembinaan-khusus-anak-1438691149>